

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH  
INDONESIA TIMUR  
(Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-  
2016)**

**Afrizal Noor Afif  
Yulianti**

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

Diterima: Oktober 2017. Disetujui: Januari 2018. Dipublikasikan: April 2018

**ABSTRACT**

*This research to analyze the influence of Local Regional Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Economic Growth to Human Development Index (HDI) at the District/City in Papua. The sample used in this study was 25 of District/City in Papua. The types of data used are secondary data sourced from the report realization of APBD in 2013-2016, as well as data on the Human Development Index (HDI) obtained through the official website of Directorate General of Financial Equalization (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). Data retrieval method using a purposive sampling technique.*

*Research result show that Local Revenue (PAD) and Special Allocation Fund (DAK) and Profit Sharing Fund (DBH) effect on the Human Development Index (HDI). While the General Allocation Funds (DAU), has no effect against the Human Development Index (HDI).*

**Keyword :** *Local Revenue(PAD), General Allocation Fund(DAU), Special Allocation Fund(DAK), Profit Sharing Fund (DBH),and Human Development Index (IPM)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Papua. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 2013-2016, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh melalui website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

## I. PENDAHULUAN

Dalam publikasi UNDP (*United Nation Development Programme*) melalui *Human Development Report* tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting dari kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yaitu pemenuhan pendidikan dan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep IPM yang dipublikasikan oleh UNDP di atas, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata di segala bidang, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil dari pembangunan tersebut. (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014). Pembangunan manusia di Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 25 tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik ditingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pembangunan lebih berhasil dan dapat memberikan serta meningkatkan salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu aspek yang penting dalam desentralisasi adalah permasalahan desentralisasi fiskal, dimana desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan

yang diberikan pemerintah daerah harus disertai pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan daerah masing-masing. Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian uang dan wewenang dari masing-masing daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Sumber pembiayaan lainnya adalah PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu terjadinya perbedaan yang signifikan antara wilayah Indonesia timur dan barat mengenai aspek-aspek yang berpengaruh terhadap besarnya Indeks Pembangunan Manusia, berdasarkan data yang terdapat dalam BPS tahun 2015

**Tabel 1.1**

**kondisi kesenjangan antara indonesia bagian barat dengan timur**

No	Indikator	Indonesia barat	Indonesia Timur
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,39%	56,76 %
2	Angka Harapan Hidup	74, 50 tahun	53,60 tahun
3	Angka Harapan Pendidikan	14,85 tahun	9,94 tahun
4	Kesenjangan Ekonomi	16,9 juta	6,4 juta

Sumber : data kesenjangan ekonomi, BPS 2015

Terdapat kesenjangan data IPM antara wilayah Indonesia barat dengan Indonesia timur sebesar 21,36%, sedangkan untuk indikator lain seperti Angka Harapan Hidup sebesar 20,9%, Angka Harapan Pendidikan sebesar 4,91%, sedangkan kesenjangan ekonomi sebesar 10,5%. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur sangatlah besar, untuk itu focus pemerintah untuk melakukan pembangunan di wilayah Indonesia timur merupakan langkah yang penting dan berpengaruh besar terhadap peningkatan IPM di wilayah tersebut, alasan dipilihnya kabupaten / kota di provinsi Papua karena kondisi pembangunan yang tergolong terlambat serta peningkatan IPM yang cenderung tidak signifikan data yang ditunjukkan berdasarkan data yang ada di BPS provinsi Papua tahun 2016.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Indikator IPM tahun 2013-2016**

No.	Indikator	Periode			
		2013	2014	2015	2016
1	IPM	56,25	56,75	57,25	58,05
2	Angka Harapan Hidup	64,76	64,48	65,09	65,12
3	Angka Harapan pendidikan	09,58	10,02	10,46	10,23
4	Kesenjangan Ekonomi	63,9	64,16	64,69	66,37

Sumber : data BPS tahun 2016,IPM dengan metode baru

Dari data tabel diatas kenaikan yang terjadi pada indikator IPM adalah sebesar 0,5 %, sedangkan untuk indikator lain seperti Angka Harapan pendidikan, Angka Harapan Hidup, serta Kesenjangan ekonomi berturut turut naik secara signifikan sebesar 0,7 %, 0,3 % dan 2,46 %. Dan peningkatan dari setiap indikator tersebut merupakan peningkatan yang rendah diantara tiap provinsi di Indonesia.

Fokus pemerintah untuk meningkatkan perkembangan IPM serta kemajuan wilayah Indonesia timur, khususnya wilayah yang masih jauh tertinggal yaitu wilayah Papua, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dengan cara melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum. Perbaikan pelayanan umum ini dilakukan pemerintah dengan menggunakan system pengalokasian pendapatan yang termasuk didalamnya adalah pengalokasian PAD, DAU, DAK, serta DBH yang merupakan faktor determinan dalam peningkatan kesejahteraan serta peningkatan IPM. Pengalokasian ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, rumahsakit, serta pelayanan umum yang lain.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Ardiansyah & Widyaningsih, 2014) yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, dan DAK, terhadap Indek Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaanya adalah penelitian ini menambahkan variabel Dana Bagi Hasil , dengan periode penelitian terbaru dan rentang waktu yang lebih panjang yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Karena dengan menggunakan

empat tahun diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi IPM saat ini, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi ini adalah “Determinan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Indonesia Timur” (studi kasus Pemerintah kota / kabupaten Provinsi Papua tahun 2013 - 2016). Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah berikut: Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia, apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia, apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia , apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia.

## II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### a. Teori Keagenan

Konsep dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori keagenan. Teori keagenan (*Agency Theory*) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Jensen dan Mecling (1976), masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain. Permasalahan keagenan ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri (Scott, 2011 dalam Ardiansyah & Widiyaningsih 2014).Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat.Dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan.Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian.Pihak principal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi dan memberikan perintah atas kontrak, mengawasi dan memberikan perintah atas kontrak tersebut.Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak tersebut.Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak principal.

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen dan legislatif (DPRD) bertindak sebagai principal. Dalam menyusun anggaran daerah dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya diserahkan ke pada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan terhadap RAPBD menjadi APBD. Dimana APBD ini dijadikan sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah pengertian Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang – undangan.. Dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Sedangkan menurut pengertian (Indra,2011;148) mengungkapkan bahwa pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### **c. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing – masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu DAU bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada yang kaya.

#### **d. Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dimaksud kebutuhan

khusus disini adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya : dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan baru didaerah terpencil, saluran irigasi primer, dan kebutuhan yang merupakan komitmen dan prioritas nasional.

#### **e. Dana Bagi Hasil**

Menurut undang – undang Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Bagi Hasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. an iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan; penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

#### **f. Indeks Pembangunan Manusia**

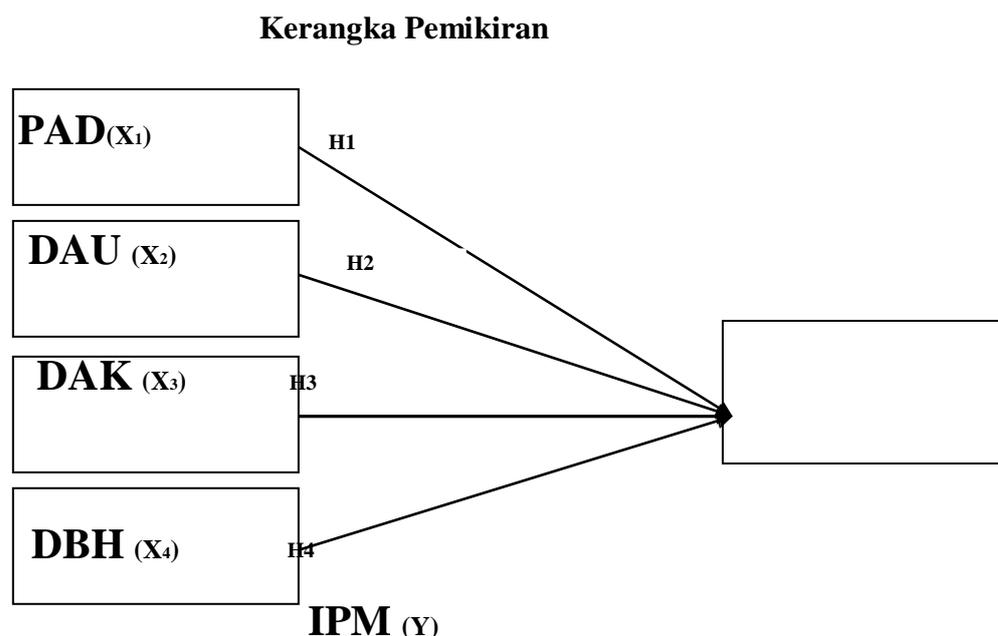
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Menurut BPS (2014) Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat

dari rata-rata besarnya pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dibentuk kerangka konseptual sebagai berikut



### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Semakin besarnya pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerahnya sendiri. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa yang berdasarkan masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk – bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak juga pada peningkatan IPM. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Ardiansyah & Widiyaningsih (2014), menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) sebagai indikator pengukur kualitas pembangunan manusia. Sementara Adiputra, dkk (2015), menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan paparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.**

**Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh karena itu, penggunaan dana ini diharapkan dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pembangunan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal. Jika kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil pula. Jadi yang dipikirkan bukan alokasi tinggi bagi kemajuan daerah tetapi pada pengalokasian yang tinggi untuk peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat (Adiputra, dkk, 2015). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro & Ananda (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan manusia.

**H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

**Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dimana penggunaan dan pemanfaatan DAK yang didasarkan pada wewenang Pemda karena DAK merupakan dari APBD. Sejak berlakunya otonomi daerah penggunaan DAK meliputi tujuh bidang pelayanan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup. Penggunaan DAK ini bertujuan untuk menunjang penerimaan daerah serta meningkatkan kapasitas belanja modal daerah. Jadi hal ini dapat mendorong peningkatan mutu kualitas pembangunan manusia melalui penggunaan DAK yang akan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwanti (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap IPM. Lugastro

(2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan teori diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut

### **H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Bagi Hasil adalah salah satu bagian dari dana perimbangan yang pengalokasiannya ditujukan untuk Pemerintah Daerah. Sumber DBH yaitu pendapatan APBN yang dilihat dari potensi masing-masing daerah berdasarkan presentase. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro dan Ananda (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2010). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Serta variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang dipisahkan (HPKD), dan Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah (LPS). Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{HPKD} + \text{LPS}$$

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH, sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} - \text{Alokasi Dasar}$$

dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan pra sarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan pra sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

PP Nomor 55 Tahun 2005, setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri

Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum} \\ \text{APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah [PAD + DAU +} \\ \text{(DBH - DBHDR)]} - \text{Belanja PNSD}$$

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Indikator DBH adalah sebagai berikut:

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

### Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam persen. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik.

$$\text{IPM}^3 = \frac{\text{I kesehatan} \times \text{I pendidikan} \times \text{I pengeluaran}}{\sqrt{\quad}} \times 100$$

### Populasi dan Metode Analisis

Populasi pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2016. Sumber data berasal dari laporan realisasi APBD provinsi Papua ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).) dan data Indeks Pembangunan manusia yang ada di BPS provinsi Papua ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten/kota yang ada di BPS provinsi Papua pada tahun 2013-2016.
- b. Pemerintah kabupaten/kota yang menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia selama periode tahun 2013-2016.
- c. Pemerintah kabupaten/kota yang melaporkan APBD secara lengkap selama periode tahun 2013-2016.
- d. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan model matematis sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Di mana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$\alpha$  = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum DAK

= Dana Alokasi Khusus DBH =

Dana Bagi Hasil

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Slope atau koefisien regresi atau intersep

$\varepsilon$  = error

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20. Pengujian yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas), uji t dan uji F serta uji koefisien determinan ( $R^2$ ).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistiek Deskriptif Variabel

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	100	1000,0	126647,0	19362,480	24210,0443
DAU	100	336371	899436	596782,49	122987,744
DAK	100	48165	331562	140176,93	67251,284
DBH	100	16793	116429	51702,46	24570,657
IPM	100	24,42	78,56	53,0434	11,98286
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data yang telah diolah, 2017.

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 100, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 1.000 oleh Kabupaten Yalimo pada tahun 2013 dan nilai maksimum 126.647 oleh Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2016. Hasil nilai mean (rata-rata) Pendapatan Asli Daerah selama periode pengamatan adalah sebesar 19.362.480. Sedangkan nilai Standar deviasi PAD sebesar 24.210.0443 dimana lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga sebaran data lebih besar.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 336.371 oleh Kabupaten Kab Deiyai pada tahun 2013 dan nilai maksimum 899.436 oleh Kabupaten Asmat pada tahun 2016. Hasil nilai mean (rata-rata) DAU sebesar 596.782,49 Sedangkan Standar deviasi DAU sebesar 122.987,744 dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data lebih kecil.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 48.165 oleh Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2013 dan nilai maksimum 331.562 oleh Kabupaten Tolikara pada tahun 2016. Hasil nilai mean (rata-rata) DAK sebesar 140.176,93. Sedangkan Standar deviasi DAK sebesar 67.251,684 dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data lebih kecil.

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar 16.793 oleh Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2014 dan nilai maksimum 182.897 oleh Kabupaten Sarmi pada tahun 2016. Hasil nilai mean (rata-rata) sebesar 51.702,46. Sedangkan Standar deviasi DBH sebesar 24.570,657 dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data lebih kecil.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki nilai minimum sebesar 24,42 oleh kabupaten Nduga tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 78,56 oleh Kota jayapura tahun

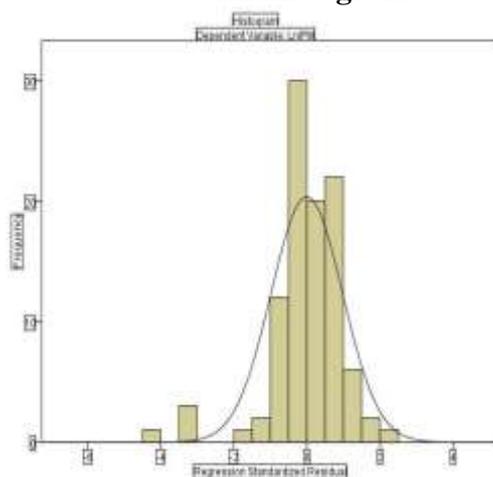
2016, dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 53,0434 dan nilai Standar deviasinya sebesar 11,98286 lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data lebih kecil.

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. (Ghozali,2016). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram dan uji One-sample kolmogorov smirnos, dengan hasil uji sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**



Sumber: Data yang telah diolah,2017.

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik, yaitu dengan menggunakan grafik histogram menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk lebih memastikan apakah residual terdistribusi normal , maka dilakukan pengujian one-sample kolmogorrov smirnov.

Tabel 4.2

### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17358306
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,096
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		1,182
Asymp. Sig. (2-tailed)		,122

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang telah diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, hasil uji Kolmogoros smirnov menunjukkan nilai kolmogorov smirnov sebesar 1,182 dengan tingkat signifikansi 0,122 lebih kecil ( $>$ ) dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sebanyak 100 sampel dari 4 variabel yang digunakan dengan periode tahun 2013-2016 berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya terjadi multikolinariatas anta variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi dalam model regresi adalah mempunyai angka tolerance  $>$  0,1 dan VIF  $<$  10 (Ghozali,2016). Hasil uji tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

### Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LnPAD@	,810	1,235
	LnDAU	,622	1,607
	LnDAK	,728	1,374
	LnDBH	,739	1,353

a. Dependent Variable: LnIPM@

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa variabel bebas PAD(tolerance = 0,810 dan VIF = 1,235), DAU (tolerance = 0,622 dan VIF = 1,607), DAK (tolerance = 0,728 dan VIF = 1,374), dan DBH (tolerance = 0,739 dan VIF = 1,353) semuanya tidak terjadi Multikolinearitas, karena nilai tolerance berada diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model rgresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.(Ghozali,2016). Diagnosa tidak terjadi autokerelasi jika angka Durbin - Watson (DW)

berkisaran antara  $du < dw < 4 - du$  (Ghozali:2012). Hasil pengujian tersebut adalah :

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.498 <sup>a</sup>	.248	.216	.11765	1,782

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnPAD@, LnDAK, LnDAU

b. Dependent Variable: LnIPM@

Sumber : Data yang telah diolah, 2017.

Dari tabel diatas diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,782 ( $du = 1,7582$  sedangkan  $4-du (4 - 1,7582 = 2,2418)$ ). Hal ini berarti model regresi diatas tidak terdapat masalah autokorelasi, karena  $DU < DW < 4 - DU (1,7582 < 1,782 < 2,2418)$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji White, uji ini dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat ( $U_2t$ ) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen, jika nilai probabilitas signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi berada dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.5**  
**Uji White**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.256	.282		.909	.366
	LnPAD@	-.012	.006	-.213	-1.929	.057
	LnDAU	-.007	.025	-.035	-.281	.779
	LnDAK	-.004	.010	-.049	-.417	.677
	LnDBH	-.005	.010	-.061	-.533	.596

a. Dependent Variable: ut2

Sumber: Data yang telah diolah, 2017.

Uji Hipotesis, Uji Simultan dan Uji R<sup>2</sup> Square

**Uji Parsial (UJI-t)**

Uji – t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial (satu per satu). Hasil pengujian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji t (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,907	,804		3,616	,000		
	LnPAD@	,046	,017	,264	2,657	,009	,810	1,235
	LnDAU	-,128	,072	-,202	-1,778	,079	,622	1,607
	LnDAK	-,088	,030	-,309	-2,948	,004	,728	1,374
	LnDBH	,104	,029	,374	3,599	,001	,739	1,353

a. Dependent Variable: LnIPM@

Sumber: data yang telah diolah, 2017.

Berdasarkan tabel Uji parsial diatas dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari pengujian secara parsial untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,657 dengan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dapat disimpulkan hipotesis satu **diterima**.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari pengujian parsial untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai t hitung sebesar -1,778 dengan nilai signifikansi  $0,079 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dapat disimpulkan hipotesis dua **ditolak**.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari pengujian parsial untuk variabel Dana alokasi Khusus (DAK), diperoleh nilai t hitung sebesar -2,948 dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hal

ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 **diterima**.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari pengujian parsial untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,599 dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 **diterima**.

### Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama). Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari Uji F sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,430	4	,108	7,768	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,301	94	,014		
	Total	1,731	98			

a. Dependent Variable: LnIPM@

b. Predictors: (Constant), LnDBH, LnPAD@, LnDAK, LnDAU

Sumber: Data yang telah diolah, 2017.

Hasil uji F test menguji pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 7,768 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi  $\text{sig.} < \alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen / tidak bebas. Nilai koefisien antara nilai nol (0) dan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas

(Independen) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2012). Koefisien dari penelitian ini adalah

**Tabel 4.8**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 <sup>a</sup>	,248	,216	,11765

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnPAD, LnDAK, LnDAU

Sumber : Data yang telah diolah, 2017.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,216. Hal ini berarti 21,6% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel dependen, yaitu Pendaoatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan sisanya 78,4% (100% - 21,6%) dijelaskan oleh faktor yang lain diluar model.

## V. KESIMPULAN, DAN KETERBATASAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap Indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua periode 2013-2016, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di provinsi Papua tahun 2013-2016
2. Tidak terdapat pengaruh antara Dana alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2016.
3. Terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2016.
4. Terdapat pengaruh antara Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2016.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai keterbatasan yang melekat di dalamnya. Beberapa keterbatasan tersebut di antaranya peneliti menggunakan empat tahun periode pengambilan sampel, ruang lingkup pengamatan hanya kabupaten/kota di Provinsi Papua, serta nilai koefisien determinan yang hanya 21,6% menunjukkan bahwa masih terdapat variabel independen lainnya yang masih bisa digali.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada, 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan SILPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening* Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015 .
- Anggraini, Tika dan Sutaryo 2015. *Pengaruh Rasio keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah*. Lombok:SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*,<http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, 2010-2016*.  
<http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Statistik Daerah Provinsi Papua 2015, 2010-2016*.  
<http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.
- Bastian, Indra, 2011. *Sistem Akuntansi sektor Publik, Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat
- Bastian, Indra, 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi 1*. Penerbit Erlangga
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. 2013. *LGF Realisasi (Annual)*.  
[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada 19 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2014. *LGF Realisasi (Annual)*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada 29 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2015. *LGF Realisasi (Annual)*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada 29 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. 2016. *LGF Realisasi (Annual)*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada 31 Mei 2017.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*.  
Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

- Lugastoro, Decta Pitron dan Candra Fajri Ananda. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah, vol.14, 3 september 2014, 1-19, Malang: Universitas Brawijaya.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.
- Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. UU Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- \_\_\_\_\_. UU Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_. UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 11 No. 3.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*. Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1.
- Sugiyono. 2010. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RnD*
- Williantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16. 3.